

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN  
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT ADAT SUKU BONAI DI DESA BONAI  
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI  
RIAU**

Muhammad Bima Alwaritsu  
NPP.30.0248

*Asdaf Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*  
Email : [bimacapra@gmail.com](mailto:bimacapra@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Teguh Ilham, S.STP, M.Arts

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Indigenous peoples are essentially an important element that is part of Indonesian society, both in terms of population size and cultural values. Unfortunately, in most of the political decisions, the existence of this indigenous community has not been accommodated, or even systematically removed from the political process and agenda from the center or the regions. There are rarely even clauses or regulations that provide firmness (guarantee) for the participation of indigenous peoples. The issue of human resources is also an aspect that is in the spotlight in viewing the political participation of indigenous peoples.

**Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the National Unity and Political Agency of Rokan Hulu Regency in improving political education for the indigenous people of the Bonai tribe in Bonai village, Bonai Darussalam sub-district, Rokan Hulu Regency, Riau Province and to find out the obstacles faced by the Rokan Hulu Kesbangpol Agency in improving political education for the indigenous people of the Bonai tribe and also the efforts made in overcoming the problems that occur in every election.

**Method:** The research method used is a qualitative method, in accordance with the objective conditions in the field, while the type of research used is descriptive qualitative, namely describing the condition of an object at present qualitatively the data obtained from the research.

**Results/Findings:** Based on the results of the research, it shows that the role of the National Unity and Political Agency of the Rokan Hulu Regency is not only to cooperate between parties, and is also not only limited to the sub-district area, but goes down directly to remote areas in Rokan Hulu Regency, including in villages with low political participation rates, so that village communities in Rokan Hulu Regency can get equality.

**Conclusion :** The National Unity and Politics Agency of Rokan Hulu Regency has an important role in organizing political education and improving the quality of political education, because the National Unity and Politics Agency has the role of being a conduit or bridge regarding political issues that exist in society, problems of good political life internally and externally, knowledge related to politics itself needs to be disseminated evenly to all levels of society in Rokan Hulu Regency, especially according to this research, namely towards the indigenous people of the Bonai tribe who are still low in knowledge regarding politics.

**Keywords: Role, Political Education, Indigenous Peoples of the Bonai Tribe.**

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat adat pada hakikatnya merupakan elemen penting yang menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia, baik secara jumlah populasi maupun nilai budayanya. Sayangnya, sebagian besar keputusan-keputusan politik, eksistensi komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses dan agenda politik dari pusat maupun daerah. Bahkan jarang sekali ada klausul atau regulasi yang memberikan ketegasan (jaminan) bagi partisipasi masyarakat adat. Persoalan sumber daya manusia juga merupakan aspek yang menjadi sorotan dalam melihat partisipasi politik masyarakat adat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai di desa Bonai kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai dan juga upaya yang dilakukan didalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada setiap Pemilu. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, sesuai dengan kondisi objektif dilapangan, adapun tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan suatu objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu bukan hanya melakukan kerja sama antar pihak, dan juga bukan hanya terbatas didaerah kecamatan saja, akan tetapi lebih turun langsung ke daerah terpencil yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, termasuk ke desa-desa yang angka partisipasi politiknya rendah, agar kesetaraan bisa didapatkan oleh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. **Kesimpulan :** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas pendidikan politik itu, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peranan menjadi penyalur atau menjembatani terkait isu-isu politik yang ada ditengah-tengah masyarakat, permasalahan kehidupan politik baik secara internal maupun eksternal yang terjadi, maka pengetahuan terkait politik itu sendiri perlu terus disosialisasikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya sesuai penelitian ini yakni terhadap masyarakat adat suku Bonai yang masih rendah pengetahuannya terkait politik tersebut.

**Kata Kunci : Peran, Pendidikan Politik, Masyarakat Adat Suku Bonai.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan yang ada pada kehidupan politik masyarakat adat suku Bonai ialah kesadaran masyarakat akan kehidupan politik yang masih rendah serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang politik yang disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat adat suku Bonai yang masih terbatas, kehidupan masyarakat adat suku Bonai yang terbelakang membuat masyarakat hanya memikirkan kelangsungan hidup mereka dengan bertani, berkebun, dan berladang, sementara kaitannya dengan pendidikan mereka cenderung acuh, tak sepenuhnya memikirkan pendidikan. Menurut masyarakat adat suku Bonai sendiri dengan bekerja lebih

menguntungkan karena dapat menghasilkan uang, setidaknya mereka dapat terus bertahan hidup dengan uang yang diperolehnya meskipun kondisi ekonominya terbelakang. Berkaca pada keadaan seperti itu terlihat bahwa keberlangsungan hidup masyarakat adat terkait kehidupan politik masih sangat rendah baik dari segi pendidikan maupun kesadaran berpolitiknya.

Aparat pemerintah desa memahami partisipasi sebagai keterlibatan warga masyarakat dalam setiap pembangunan baik dari desa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Adapun makna keterlibatan disini lebih diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan dari pemerintah secara fisik. Begitu pula dengan pemahaman masyarakat adat, mereka hanya menganggap bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dalam gotong royong dalam ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Partisipasi politik hanya dimaknai sebagai keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, baik dalam kampanye maupun dalam memberikan hak suaranya sudah sangat umum dipahami oleh masyarakat desa, begitu juga dengan aparat pemerintah desa, meskipun memahami bahwa partisipasi politik membutuhkan keterlibatan aktif dalam bidang politik, namun tetap menyebutkan kegiatan pemilihan umum sebagai bentuk dari partisipasi politik.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Adat Suku Bonai di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Yaitu Pelaksanaan program pendidikan politik di desa Bonai sendiri sudah ada, akan tetapi didalam penyelenggaraannya belum maksimal, karena masih adanya kendala-kendala yang menghambat belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik baik secara internal kendala yang menjadi penghambat belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan politik di desa Bonai. Yakni masih terbatasnya anggaran yang didapatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan politik setiap tahunnya di Kabupaten Rokan Hulu. Keterbatasan Anggaran Program - program prioritas hingga saat ini belum berpihak kepada kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan politik. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik karena kegiatan pendidikan politik akan dilaksanakan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Kemudian dalam Penyusunan Renstra yang menyulitkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu untuk mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik secara maksimal dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan yang berkaitan pendidikan politik belum termasuk kegiatan yang menjadi perhatian utama bagi pemerintahan daerah, sehingga kegiatan pendidikan politik hanya sebatas rutinitas ataupun menyesuaikan dengan kegiatan – kegiatan yang lebih utama lainnya. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki silabus terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang belum teratur (permanen) baik waktu maupun materi yang akan diberikan. Metode pelaksanaan yang monoton, diperlukan inovasi untuk menarik perhatian masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan selama ini hanya sebatas kebiasaan – kebiasaan yang sudah berjalan. Dan juga kualitas Sumber Daya Manusia Salah satu faktor utama dari penentuan kualitas SDM adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar untuk setiap manusia, dengan berpendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki intelektual yang baik dan terhindar dari kebodohan. Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Kualitas dari pendidikan ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan itu sendiri.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Proses penyelenggaraan pendidikan politik maupun konteks pelaksanaan peningkatan pendidikan politik. Yang pertama penelitian terdahulu dengan judul Proses Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2017 Oleh Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, (Anjani, 2018). Kemudian yang kedua penelitian terdahulu yang berjudul Pendidikan Politik Bagi Perempuan oleh Badan Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik di Kabupaten Kebumen (Hidayati, 2019). Kemudian yang ketiga penelitian terdahulu yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa, (Suharno & Rahman 2020).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Adat Suku Bonai Di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Anjani 2018, Hidayati 2019 dan Suharno & Rahman 2020. Selain itu konsep yang ada pada penelitian ini ialah berdasarkan konsep tentang peran menurut Komarudin (1994 : 768) ada lima poin yakni sebagai berikut, bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen, pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya, serta fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menggambarkan peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai di Desa Bonai. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai di Desa Bonai. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sifat deskriptif yang mana masalah pada penelitian ini memiliki hubungan secara langsung kepada manusia secara hakiki yang bersandar kepada analisis, pengamatan, serta pengelolaan peristiwa secara langsung yang ada dilapangan dan melihat interaksi secara sosial serta melaksanakan wawancara atau observasi. Metode Kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan berdasarkan kepada filsafat postpositivisme, dipakai dalam melakukan penelitian kepada objek secara alamiah, yang dimana seorang peneliti ialah menjadi instrumen utama, dalam pengambilan sampel terhadap sumber data yang dilaksanakan dengan *purposive*, teknik penelitian triangulasi

atau gabungan, dengan analisis data yang memiliki sifat kualitatif pendekatan induktif, serta hasil dari penelitian dengan kualitatif ini lebih mengutamakan makna daripada dibanding generalisasi (Sugiyono, 2008). Deskriptif sendiri mempunyai pengertian sebagai pendekatan dalam memahami manusia, objek, suatu kondisi, peristiwa dan pemikiran pada waktu saat ini. Lain dari itu pengertian kualitatif dari pendapat Bogdan serta Taylor ialah sebuah prosedur dari penelitian dengan menciptakan data secara deskriptif yakni seperti kata atau kalimat tertulis serta lisan dari pelaku atau orang yang dilakukan pengamatan (Moleong, 2002). Pada penelitian secara kualitatif ialah penelitian dengan maksud guna mengetahui fenomena berkaitan dengan yang sedang dialami oleh pihak subjek dari penelitian seperti persepsi, tindakan, motivasi, perilaku dan lain-lain. Selanjutnya secara menyeluruh atau holistik menggunakan cara deskripsi menjadi berbentuk bahasa serta kata-kata, Dalam sebuah konteks yang khusus dengan alamiah menggunakan bermacam-macam metode secara alamiah (Moleong, 2011).

Dapat disimpulkan dari dua pengertian yang sudah dijabarkan tersebut bahwasanya penelitian secara kualitatif ialah penelitian dengan melaksanakan secara penuh kepada subjek penelitian yang mana hasil penelitian tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan serta data induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam pendekatan secara deskriptif kualitatif ialah pendekatan dengan mengutamakan kondisi secara realitas yang terjadi menggunakan kalimat ataupun kata-kata yang berakhiran dengan simpulan. Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasannya penelitian secara deskriptif kualitatif ialah sebuah prosedur dalam pemecahan permasalahan yang dilakukan selidikan menggunakan lukisan atau gambaran kondisi sebuah objek maupun objek dalam panel (Lembaga, perseorangan, masyarakat dan lain sebagainya) Selanjutnya saat ini berlandaskan fakta yang terlihat menjadi objek (Soerjono Soekanto, 2007).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Para narasumber yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Politik dalam negeri dan ormas, Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri, Masyarakat Adat suku Bonai, termasuk kepala desa Bonai, Kepala Adat, Masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan masyarakat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran ialah aspek dinamis dari suatu posisi, artinya seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia telah melakukan peran itu. Peran yang melekat pada diri seseorang dibedakan menurut kedudukan atau posisinya dalam kehidupan bermasyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merepresentasikan kedudukan individu tersebut dalam organisasi sosial. Peran lebih tentang fungsi, kesesuaian, dan proses.

Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keamanan dasar dengan mengurus masalah agama dan kepercayaan serta mengendalikan ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Sumaryadi, 2010).

Teori peran pemerintah yang dikemukakan menurut teori Arif dalam (Nurdin, 2014), yakni :

1. Peran pemerintah sebagai regulator dalam menentukan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui pemberlakuan peraturan dan pemerintah sebagai badan penyelenggara, memberikan acuan dasar bagi masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan.
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah pemerintah dalam memobilisasi partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat

ditunjukkan dalam pemberian instruksi melalui kelompok advokasi yang luas dan sejumlah lembaga penyelenggara pelatihan.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator, khususnya perannya dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah berupaya menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang kondusif, membantu melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan pendidikan.

4. Peran pemerintah sebagai katalisator adalah pemerintah diposisikan sebagai agen yang mendorong perkembangan potensi suatu daerah atau negara.

### **3.1 Peran sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan karena dengan adanya regulasi maka sudah disiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan suatu kegiatan dalam bentuk aturan-aturan yang diterbitkan dalam rangka ketertiban dan efektivitas dalam berjalannya kegiatan tersebut. Begitu juga dalam hal pendidikan politik, pemerintah kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan aturan-aturan terkait pendidikan politik ini bagi masyarakat pemilih pemula dan masyarakat suku-suku pedalaman di kabupaten Rokan Hulu, dan juga melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Rokan Hulu yang berperan sebagai regulator. Dalam penyusunan Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dan daerah serta pembangunan lintas sektor di Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisipatif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematis penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Untuk kebijakan program yang disusun pada Renstra Kesbangpol 2022-2026 sebagaimana peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol.

### **3.2 Peran sebagai Dinamisator**

peran pemerintah sebagai dinamisator sebagaimana yang dijelaskan pada teori Arif dalam (Nurdin) 2014 yakni Badan Kesbangpol memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang melibatkan partai politik dalam penyelenggaraan peningkatan pendidikan politik di Kabupaten Rokan Hulu, serta pada dinamisator terkait observasi yang ada dilapangan, peneliti melihat bahwa proses sosialisasi dan bimbingan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol yakni secara langsung kepada masyarakat, melalui parpol, KPU dan Bawaslu serta pihak-pihak penyuluhan terkait pendidikan politik tersebut.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta agar mengetahui segala tahapan yang akan dilakukan oleh KPU maupun Panwas terkait pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Bonai Darussalam Sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pemilu/Pilkada bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi hak konstitusinya sebagai warga negara.

Kerjasama antara Bakesbangpol dan KPU Kabupaten Rokan Hulu merupakan upaya serius keduanya dalam mensukseskan Pilkada/Pemilu di Kecamatan Bonai Darussalam. Sosialisasi tersebut merupakan pemahaman bagi masyarakat adat desa terkait dengan agenda-agenda politik seperti tujuan diadakannya pemilu, jadwal pelaksanaan pemilu, cara memberikan suara, pemahaman terkait suara sah dan tidak sah. Sosialisasi pemilu disini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat secara langsung, agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pemilu yang sesungguhnya.

### **3.3 Peran sebagai Fasilitator**

Sebagai fasilitator, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu menyediakan sarana dan prasarana program pendidikan politik serta fasilitas penunjang pelaksanaan pendidikan politik tersebut, kemudian Badan Kesbangpol didalam menunjang fasilitasi pendidikan politik yakni dengan adanya sosialisasi bantuan politik yang merupakan bagian dari Pendidikan politik oleh Partai Politik hal ini tercantum dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa bantuan parpol tersebut 60% dana dialokasikan untuk pendidikan politik, untuk kepentingan kader dan masyarakat umum, seperti untuk kepentingan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sesuai yang sudah tercantum dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2014.

peran Badan Kesbangpol sebagai fasilitator atau sebagai penyedia fasilitas penunjang program pendidikan politik ini sudah ada di kecamatan Bonai Darussalam, dengan adanya fasilitas penunjang pendidikan politik yang berupa kegiatan seminar atau workshop pendidikan politik itu, akan tetapi tidak secara merata didapatkan oleh masyarakat adat suku Bonai yang ada di desa Bonai, dikarenakan sarana prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan pendidikan politik terbatas di lingkup kecamatan Bonai Darussalam, dan hanya sebagian masyarakat adat suku Bonai saja yang menjadi perwakilan desa Bonai untuk mendapatkan fasilitas dari Badan Kesbangpol tersebut terkait penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat.

### **3.4 Peran sebagai Katalisator**

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu sebagai katalisator yaitu sebagai OPD Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tupoksi guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik masyarakat di kabupaten Rokan Hulu, peran Kesbangpol sebagai katalisator ialah melakukan koordinasi antar pihak terkait, dalam hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat kabupaten Rokan Hulu. peran Kesbangpol Rokan Hulu terkait kerja sama dengan pihak terkait baik KPU, Bawaslu, dan pemerintah Kecamatan Bonai Darussalam sudah dijalankan, akan tetapi untuk langsung ke desa Bonai sendiri belum terselenggarakan, karena hanya perwakilan dari masyarakat adat desa Bonai saja yang menjadi perwakilan untuk mendapatkan program pendidikan politik tersebut.

Peran pemerintah sebagai katalisator yang ada pada teori Arif (Nurdin:2014) yakni Badan Kesbangpol mempunyai kedudukan didalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan politik sebagaimana yang terdapat pada Renstra Kesbangpol 2022-2026, serta Badan Kesbangpol melakukan upaya koordinasi kerja sama dengan berbagai pihak didalam mendukung penyelenggaraan peningkatan pendidikan politik.

Koordinasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu bukan hanya semata-mata pada setiap kegiatan tetapi juga dalam banyak hal selalu koordinasi antar instansi. Sehingga masing-masing departemen atau bidang mampu menjalankan sesuai dengan apa yang di

koordinasikan atasan. Koordinasi dalam pendidikan politik memang melibatkan berbagai unsur dari Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik serta masyarakat. Koordinasi pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada pihak yang terkait.

Dari koordinasi tersebut dapat diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak terkait yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada interpretasi dari pelaksanaan kebijakan, baik dari kelompok sasaran (generasi muda) dan juga pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Konsistensi dalam memberikan informasi, sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan juga pihak terkait.

Koordinasi antara instansi terkait dalam melaksanakan pendidikan politik merupakan sebuah komponen bersama dan saling berkaitan dalam membentuk sistem dan berada dalam suatu sistem yang lebih besar. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada masing-masing instansi dalam memenuhi tugas kewajiban serta tanggung jawabnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan diharapkan nantinya program pendidikan politik dapat serasi dengan instansi lainnya, sehingga nantinya instansi dapat memelihara kesinambungan program dengan program instansi lain dalam hal instansi-instansi yang bersangkutan memegang peranan profesional sepanjang penyelenggaraan program pendidikan politik.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik, dimana terdapat pada aturan yang terdapat pada Renstra Kesbangpol yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan sebagai landasan dalam melaksanakan fungsi peningkatan pendidikan politik. Hal ini berbeda dengan temuan oleh Anjani, 2018 dimana Proses implementasi kegiatan pendidikan politik di Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat meliputi 4 jenis, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti proses persiapan dan implementasi, proses praorganisasi, proses implementasi, serta proses evaluasi implementasi. Faktor pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik adalah kerjasama yang baik dengan partai politik, kelengkapan data, kemudahan perizinan, dan partisipasi masyarakat yang baik.

Faktor penghambatnya adalah kurangnya dana, ruang pelaksanaan yang minim dan etos kerja karyawan yang buruk. Sementara pada temuan utama penelitian ini, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik, dan juga penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai. peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan teori peran pemerintah oleh Arif (Nurdin, 2014).

Dimana terdapat empat dimensi yang ada pada teori tersebut, yakni peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Dengan adanya dimensi tersebut, diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni tentang Bagaimana peran Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai di desa Bonai, serta apa saja yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai di desa Bonai tersebut.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat adat suku Bonai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, antara lain yaitu :

Pelaksanaan program pendidikan politik di desa Bonai sendiri sudah ada, akan tetapi didalam penyelenggaraannya belum maksimal, karena masih adanya kendala-kendala yang menghambat belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik baik secara internal maupun eksternal.

Berikut ini kendala yang menjadi penghambat belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan politik di desa Bonai.

- Faktor Internal

#### 1. Terbatasnya anggaran

Anggaran yang didapatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan politik setiap tahunnya di Kabupaten Rokan Hulu. Keterbatasan Anggaran Program - program prioritas hingga saat ini belum berpihak kepada kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan politik. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik karena kegiatan pendidikan politik akan dilaksanakan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

#### 2. Penyusunan Renstra

Penyusunan yang menyulitkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu untuk mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik secara maksimal dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan yang berkaitan pendidikan politik belum termasuk kegiatan yang menjadi perhatian utama bagi pemerintahan daerah, sehingga kegiatan pendidikan politik hanya sebatas rutinitas ataupun menyesuaikan dengan kegiatan – kegiatan yang lebih utama lainnya.

#### 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki silabus

Jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang belum teratur (permanen) baik waktu maupun materi yang akan diberikan. Metode pelaksanaan yang monoton, diperlukan inovasi untuk menarik perhatian masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan selama ini hanya sebatas kebiasaan – kebiasaan yang sudah berjalan.

#### 4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama dari penentuan kualitas SDM adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar untuk setiap manusia, dengan berpendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki intelektual yang baik dan terhindar dari kebodohan. Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Kualitas dari pendidikan ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan itu sendiri.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan non teknis yang terjadi ialah berkaitan dengan penyusunan renstra Badan Kesbangpol 2022-2026, tidak adanya silabus serta kualitas SDM masyarakat terutama dari bidang pendidikan politik itu sendiri.

Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat proses penyelenggaraan peningkatan pendidikan politik ini belum maksimal adalah keterbatasan anggaran terkait fasilitas pendidikan politik terhadap masyarakat adat suku Bonai, kemudian keterjangkauan terhadap masyarakat adat suku Bonai di Desa Bonai yang jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Rokan Hulu yang berjarak kurang lebih 115,5 km.

- Faktor Eksternal

Selain dari kendala yang berasal dari internal, tentunya terdapat juga penghambat yang berasal dari eksternal, berikut ini faktor eksternal yang ada pada proses penyelenggaraan pendidikan politik tersebut, yakni:

### 1. Kurangnya minat masyarakat

Minat masyarakat adat suku Bonai untuk mempelajari tentang pendidikan politik secara mandiri masih sangat kurang. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara peneliti dengan lima belas sampel masyarakat adat suku Bonai pada tanggal 12 Januari 2023 di kantor desa Bonai, yaitu: Kami masyarakat Bonai ini tidak tertarik untuk mengikuti pendidikan politik ini, karena kami lebih mementingkan kebutuhan hidup kami sehari-hari untuk kami bertahan hidup.

### 2. Letak Desa Bonai

Letak desa Bonai yang secara geografis jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Rokan Hulu merupakan faktor penghambat lainnya. Hal ini Karena jarak Desa Bonai yang jauh sekitar 115,5 km dari kantor Badan Kesbangpol Rokan Hulu menyebabkan kurang maksimalnya penyelenggaraan peningkatan pendidikan politik.

### 3. Tidak adanya tempat khusus penyelenggaraan pendidikan politik

Untuk melakukan kegiatan fasilitasi pendidikan politik di Desa Bonai, seperti halnya sekolah yang membutuhkan kelas dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di Desa Bonai yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan politik, namun sangat disayangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan politik di Desa Bonai belum ada, tentunya hal ini menjadi penghambat tidak maksimalnya pendidikan politik di Desa Bonai tersebut. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Faktor eksternal ialah kurangnya minat masyarakat adat suku Bonai dan masih rendahnya keinginan masyarakat adat suku Bonai terkait pendidikan politik untuk mempelajari tentang pendidikan politik secara mandiri serta Tidak adanya tempat khusus untuk melakukan kegiatan fasilitasi pendidikan politik di Desa Bonai, sehingga faktor penghambat yang terjadi, menyebabkan tidak maksimalnya pendidikan politik di Desa Bonai tersebut.

## IV. KESIMPULAN

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Adat Suku Bonai di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yakni sebagai berikut :

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator, Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu terkait program pendidikan politik belum maksimal didalam pelaksanaannya yakni indikator dinamisator belum terselenggarakan sosialisasi pendidikan politik langsung ke Desa Bonai, melainkan terbatas di Kecamatan Bonai Darussalam saja.

Hambatan yang terjadi ialah berupa hambatan yang berasal secara internal, yaitu :

a. Terbatasnya anggaran b. Penyusunan renstra Badan Kesbangpol 2022-2026, c. Belum memiliki silabus d. Kualitas Sumber Daya Manusia. Kemudian hambatan yang berasal secara eksternal, yaitu :

a. Kurangnya minat masyarakat adat suku Bonai b. Letak Desa Bonai yang terpencil c. Tidak adanya tempat khusus dalam penyelenggaraan pendidikan politik.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu ialah a. mengadakan program pendidikan politik ini ke tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu b. Merumuskan Renstra dengan mengutamakan proses penyelenggaraan pendidikan politik c. Meningkatkan suplai keuangan kepada partai politik dalam bentuk Bantuan keuangan partai politik, dengan catatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu d. Memperbarui metode dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang lebih inovatif e. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten,

baik dari penyelenggaranya yaitu Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari para narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya serta Kepala desa Bonai dan juga masyarakat adat suku Bonai yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Anjani, E. (2018). *Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik tahun 2017 oleh sub bidang fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation).

Arif., 2014. *Peran dan fungsi pemerintah, pada 12 february 2012 peran-dan-fungsi-pemerintahan*. di ambil tanggal 15 januari 2014.

Hidayati, U. (2019). *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen*. 1–89.

Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja, hal 11

Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 81 Tahun 2019 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang *Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

Rahman, A., & Suharno, S. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.

Renstra Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu 2022-2026.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

